

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Lahirnya Undang-Undang (UU) Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Pemda) dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, menjadi titik awal dimulainya otonomi daerah. Otonomi daerah (otoda) adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan. Sedangkan perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah merupakan pemerataan antar daerah secara proporsional, demokratis, adil, dan transparan dengan memperhatikan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah sejalan dengan kewajiban dan pembagian kewenangan tersebut, termasuk pengelolaan dan pengawasan keuangannya.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 telah memberi kewenangan yang lebih luas pada Pemerintah Daerah tingkat Kabupaten untuk menyelenggarakan semua urusan Pemerintah mulai dari perencanaan, pengendalian dan evaluasi, sehingga mendorong Pemerintah Daerah untuk lebih memberdayakan semua potensi yang dimiliki dalam rangka membangun dan mengembangkan daerahnya. Sebenarnya pertimbangan mendasar terselenggaranya otonomi daerah adalah perkembangan dari dalam negeri yang mengindikasikan bahwa rakyat menghendaki keterbukaan dan kemandirian. Selain itu, keadaan luar

negeri yang banyak menunjukkan bahwa semakin maraknya globalisasi yang menuntut daya saing tiap negara, setiap Pemerintah Daerah. Hal tersebut akan tercapai dengan peningkatan kemandirian Pemerintah Daerah melalui program otonomi daerah. Tujuan program otonomi daerah adalah mempercepat pertumbuhan ekonomi dan perkembangan daerah dan meningkatkan kualitas pelayanan publik agar efisien dan responsif terhadap kebutuhan, potensi maupun karakteristik di daerah masing-masing.

Salah satu aspek penting dari Pemerintah Daerah yang harus diatur secara hati-hati adalah pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah. “Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah” (Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005).

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan instrumen kebijakan yang utama bagi Pemerintah Daerah. Sebagai instrumen kebijakan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah mendukung posisi sentral dalam upaya pengembangan kapabilitas dan efektifitas Pemerintah Daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dapat digunakan sebagai alat untuk menentukan besarnya pendapatan dan pengeluaran, membantu pengambilan keputusan dan pencapaian pembangunan, otoritas pengeluaran di masa-masa yang akan datang, sumber pengembangan ukuran-ukuran standar untuk evaluasi kinerja, alat untuk memotivasi para pegawai dan alat koordinasi bagi semua aktivitas dari berbagai unit kerja.

Secara spesifik, tujuan laporan keuangan oleh Pemerintah Daerah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas (pertanggungjawaban) Pemerintah Daerah atas sumber yang dipercayakan. Pemerintah Daerah sebagai pihak yang diserahi tugas untuk menjalankan roda pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan daerahnya untuk dinilai apakah berhasil menjalankan tugasnya dengan baik atau tidak.

Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau program atau kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Secara umum kinerja merupakan prestasi yang dapat dicapai oleh organisasi dalam periode tertentu (Bastian, 2005:274). Jadi, analisis kinerja keuangan Daerah Kabupaten Pamekasan adalah suatu proses penilaian mengenai tingkat kemajuan pencapaian pelaksanaan pekerjaan atau kegiatan Kabupaten Pamekasan dalam bidang keuangan untuk kurun waktu tertentu.

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, penulis memilih salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Timur, yaitu Kabupaten Pamekasan. Kabupaten ini menjadi menarik sebagai salah satu obyek penelitian karena untuk mengetahui bagaimana kinerja keuangan Daerah Kabupaten Pamekasan. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan membuktikan kemampuan Pemerintah Kabupaten Pamekasan dalam mengelola keuangan, maka penulis mengangkat judul “Analisis Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Pamekasan”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana kinerja keuangan Daerah Kabupaten Pamekasan jika dilihat dari Rasio Efektifitas dari tahun 2008-2012 ?
2. Bagaimana kinerja keuangan Daerah Kabupaten Pamekasan jika dilihat dari Rasio Pajak terhadap PAD dari tahun 2008-2012 ?
3. Bagaimana kinerja keuangan Daerah Kabupaten Pamekasan jika dilihat dari Rasio Kemandirian dari tahun 2008-2012 ?
4. Bagaimana Analisis *Trend* untuk Rasio Efektifitas, Rasio Pajak Daerah terhadap PAD, Rasio Kemandirian pada kinerja keuangan Daerah Kabupaten Pamekasan pada tahun 2008 sampai dengan 2012?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai penulis dari penelitian yang dilakukan ini adalah untuk mengetahui :

1. Kinerja keuangan Daerah Kabupaten Pamekasan jika dilihat dari Rasio Efektifitas dari tahun 2008-2012.
2. Kinerja keuangan Daerah Kabupaten Pamekasan jika dilihat dari Rasio Pajak Daerah terhadap PAD dari tahun 2008-2012.
3. Kinerja keuangan Daerah Kabupaten Pamekasan jika dilihat dari Rasio Kemandirian dari tahun 2008-2012.
4. Perkiraan kinerja keuangan melalui Analisis *Trend* untuk Rasio Efektifitas, Rasio Pajak Daerah terhadap PAD, Rasio Kemandirian pada kinerja keuangan Daerah Kabupaten Pamekasan pada tahun 2008 sampai dengan 2012.

1.4 Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian dalam menganalisis kinerja keuangan Daerah Kabupaten Pamekasan dengan menerapkan rasio efektifitas, rasio pajak daerah terhadap PAD, rasio kemandirian adalah sebagai berikut :

a. Instansi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi atau sumbangan pemikiran Pemerintah Daerah didalam menganalisis Kinerja Keuangan guna meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah pada perkembangan zaman yang semakin kompetitif.

b. Lembaga Pendidikan

Secara teoritik tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Pamekasan ditinjau dari teori Rasio Efektifitas, Rasio Pajak Daerah terhadap PAD, Rasio Kemandirian, Analisis *Trend* untuk menganalisis Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Pamekasan.

c. Peneliti

Penelitian ini merupakan media untuk belajar memecahkan masalah secara ilmiah dan pengaruh penerapan teori Rasio Efektifitas, Rasio Pajak Daerah terhadap PAD, Rasio Kemandirian, Analisis *Trend* untuk menganalisis kinerja keuangan Daerah Kabupaten Pamekasan.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada 14 Januari – 14 April 2013. Pelaksanaan penelitian bertempat di DPPKAD Kabupaten Pamekasan yang berlokasi di jalan Stadion Nomor 58a Pamekasan. Secara garis besar Praktek Kerja Lapangan (PKL) ini dibagi menjadi beberapa tahap kegiatan, diantaranya :

Merupakan kegiatan yang berkaitan dengan persiapan yang dilakukan untuk pelaksanaan Praktek Kerja Lapang (PKL), seperti pencarian lokasi PKL, pembuatan proposal, dan lain-lain untuk memudahkan kegiatan magang.

Merupakan kegiatan yang berkaitan dengan proses magang atau pengamatan terhadap aktivitas yang ada di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (DPPKAD).

Merupakan kegiatan untuk mengumpulkan data yang diperoleh dan merumuskan dalam bentuk data olahan. Kemudian dari data tersebut akan dilakukan pembahasan dan dijadikan sebuah kesimpulan.

Jadwal pelaksanaan kegiatan PKL yang dilaksanakan di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah(DPPKAD) adalah sebagai berikut:

[illegible]

Keterangan Tabel:

a. Persiapan Umum

Kegiatan persiapan umum merupakan kegiatan dalam mencari lokasi PKL yang akan dituju dan mempersiapkan proposal untuk memudahkan dalam memfokuskan tujuan dilaksanakannya PKL tersebut.

b. Pelaksanaan PKL

Tahap ini mahasiswa melaksanakan kegiatan PKL sesuai dengan apa yang telah direncanakan mulai dari mengetahui deskripsi secara umum mengenai PKL (Praktek Kerja Lapang), ikut serta dalam kegiatan PKL mulai dari awal sampai akhir.

c. Penyusunan Laporan

Kegiatan mengumpulkan data yang diperoleh dan perumusan dalam bentuk kesimpulan dan jika perlu ditambahkan saran-saran yang berkaitan dengan subyek Praktek Kerja Lapang (PKL)